# BAB V

# SARAN DAN REKOMENDASI
## (ANALISIS PRESKRIPTIF)

### A. Perkembangan Ekonomi Sebagai Prasyarat Pembangunan Pendidikan

Seperti yang ditegaskan oleh Heidenheimer (1990: 31) bahwa "di negara yang sistem politiknya tersentral (sentralistik), kebijakan sektor pendidikannya terpusat di dalam perundang-undangan nasional. Sebab di negara yang pemerintahannya sentralistik permasalahan implementasi kebijakan itu relatif sedikit. Sedangkan di dalam sistem pemerintahan desentrasliasi kebijakan pendidikan menjadi keputusan banyak badan yang secara relevan berkaitan dengan sektor pendidikan. Lebih dari itu, perubahan-perubahan reformasi kebijakan pendidikan harus selalu dirundingkan bersama dengan pemerintah daerah yang sudah diberi otonomi secara politik". Maka ketika sudah diketahui bahwa kebijakan pendidikan Indonesia ternyata didesain dan diterapkan secara desentralisasi (sama dengan AS), sampailah kita membuat analisis preskriptif yang dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi perbaikan dan reformasi (bilamana dimungkinkan) kebijakan pendidikan di Indonesia. Analisis preskriptif penulis adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam banyak hal Indonesia sama dengan AS. Mungkin hal ini dikarenakan Indonesia lebih condong mereformasi kebijakan pendidikan berdasarkan hasil studi pengalaman di negara AS. Arah politik kebijakan dengan demikian adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya demokratisasi dari tingkat paling bawah ke tingkat yang lebih pusat, dari sektor yang paling sempit dampaknya ke sektor yang dampaknya sangat kompleks. Keterlibatan masyarakat luas dengan demikian sangat

diperlukan. Demikian juga faktor-faktor lingkungan, seperti pertumbuhan ekonomi, harus didisain sedemikian rupa sehingga misi politik dalam desentralisasi pendidikan dapat dicapai dengan optimal. Khusus untuk variabel ekonomi ini penulis sengaja menganalisisnya berdasarkan teori Huntington seperti dijelaskan di bawah ini.
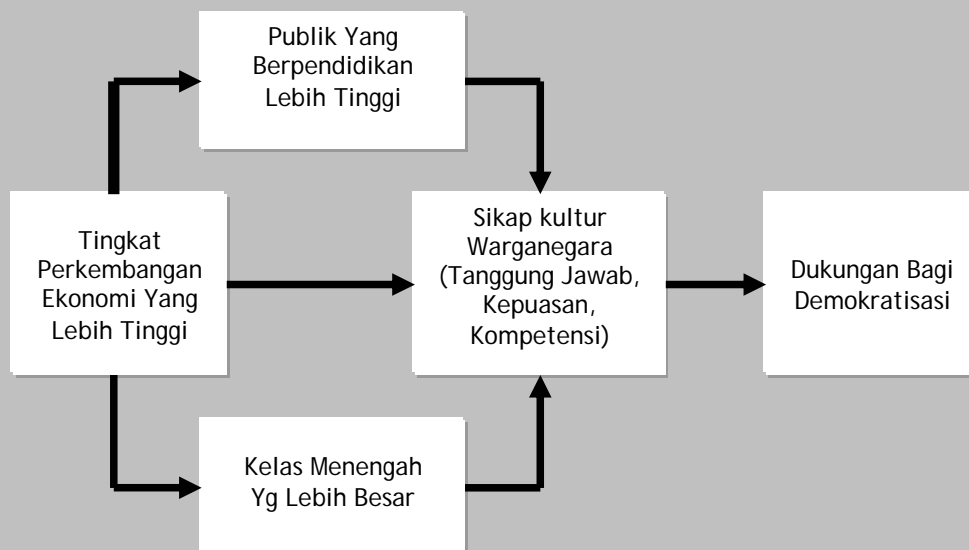
**Sumber**:
Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization In The Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press, 1991, (Diindonesiakan dalam *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Menurut Samuel P. Huntington (1991), perkembangan ekonomi merupakan faktor yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan pada struktur social dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat, yang pada gilirannya mendorong terjadinya proses demokratisasi. Terhadap teorinya ini, Huntington menjelaskan 5 argumentasinya:

Pertama; Bahwa tingkat kemakmuran ekonomi dalam suatu masyarakat dapat membentuk "nilai dan sikap" positif pada masyarakat tersebut (yaitu; ditandai dengan tumbunya sikap saling mempercayai, rasa tanggung jawab antar pribadi karena dipercaya, berkembangnya kepuasan hidup, dan munculnya kompetensi). Hal itu pada gilirannya berkorelasi kuat pada eksistensi lembaga-lembaga demokrasi. Huntington mendasarkan argumentasi ini dari hasil kajian yang dilakukan oleh (a). Alex Inkeles dan Larry J. Diamond, "Personal Development and National Development: A Cross-National Perspective," dalam *The Quality of Life: Comparative Studies*, ed. Alexander Szalai dan Frank M. Andrews, (London: Sage Publications, 1980), hal. 83. (b). Lipset, Seong dan Torres, "Social Requisites of Democracy," hal.24-25. (c). Ronald Inglehart, "The Renaissance of Political Culture," *American Political Science Review 82* (Desember 1988), hal. 12, 15-20.

Kedua; Bahwa perkembangan ekonomi meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Orang-orang berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki cirri-ciri seperti tanggung jawab, kepuasan, dan kompetensi yang cocok dengan demokrasi.

Ketiga; Bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan lebih banyak sumber daya tersedia untuk didistribusikan di antara kelompok-kelompok social sehingga memudahkan tercapainya akomodasi dan kompromi.

Keempat; Bahwa dalam sejarahnya pada dasawarsa 1960 dan 1970, perkembangan ekonomi mempersyaratkan dan juga mendorong keterbukaan masyarakat bagi perdagangan, investasi, teknologi, pariwisata, dan komunikasi dengan luar negeri. Keikutsertaan suatu Negara di dalam perekonomian dunia (umumnya dengan negara-negara industri) menciptakan sumber-sumber kekayaan dan pengaruh dari lembaga-lembaga non-pemerintah serta membuka

masyarakat itu terhadap dampak (hasil) dari ide-ide demokrasi yang umumnya terdapat di negara-negara industri.

Kelima; Bahwa perkembangan ekonomi mendorong meluasnya kelas menengah. Semakin lama jumlah masyarakat yang bermatapencaharian sebagai pengusaha, kaum professional, pemilik toko kecil, guru, pegawai negeri, manajer, teknisi, klerek dan pekerja di bidang penjualan semakin banyak.

Apa artinya. Reformasi pendidikan yang sudah dilakukan dengan kebijakan desentralisasi akan tidak berarti apa-apa jika ternyata pemerintah tidak menciptakan kondisi makro ekonomi yang kondusif bagi masyarakat untuk berkembang kemampuan ekonominya seirama dengan berkembangnya ekonomi makro. Sekarang ini sudah banyak cerita dan fakta di daerah (kabupaten/kota) yang menggambarkan betapa angka partisipasi pendidikan dasar kita masih belum optimal. Untuk ke SD saja ternyata masih banyak anak usia sekolah yang tidak bisa memasuki daya tampung yang disediakan. Demikian juga ke jenjang sekolah lanjutan, apalagi ke perguruan tinggi. Problemnya adalah karena rendahnya akses ekonomi masyarakat.

Sebagai gambaran, berikut ini penulis sajikan data di Kota Surabaya. Kota Surabaya sengaja penulis ambil sebagai contoh kasus, dengan pertimbangan bahwa Kota Surabaya merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang tingkat pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Demikian juga kemampuan ekonomi masyarakat diasumsikan memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan di wilayah kabupaten-kabupaten terpencil. Maka ketika ditemukan bahwa untuk kasus semacam Kota Surabaya saja tingkat partisipasi pada pendidikan SD dan SMP masih belum optimal, lalu bagaimana kira-kira dengan tingkat partisipasi pada pendidikan SD dan SMP di wilayah kabupaten yang kondisi ekonominya tidak lebih baik dari Kota Surabaya.

**TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN**
**SD dan SMP DI SURABAYA**

| TINGKAT SD/SEDERAJAT | | | |
|---|---|---|---|
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat | | 90,99 persen |
| | Jumlah Siswa SD/Sederajat di Surabaya | | 262.225 anak |
| | Perkiraan anak usia sekolah (7-12 th) yang tdk bisa mengenyam pendidikan | | 26.000 anak |
| TINGKAT SMP/SEDERAJAT | | | |
| | Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/Sederajat | | 79,18 persen |
| | Jumlah Siswa SMP/Sederajat di Surabaya | | 108.912 anak |
| | Perkiraan anak usia sekolah SMP (13-15 th) belum menduduki bangku SMP/Sederajat | | 28.000 anak |
| ANGKA PUTUS SEKOLAH | | | |
| | Jenjang SD | 0,1 persen | 260 anak |
| | Jenjang SMP | 0,38 persen | 400 anak |
| ANGKA TRANSISI | | | |
| | Dari SD ke SMP | 90,93 persen | |
| | Dari SMP ke SMA | 62,07 persen | |

**Sumber**: Jawa Pos, 11 Oktober 2005, hal.10: *"Tingkat Partisipasi Pendidikan SD dan SMP di Surabaya: Tinggi, Jumlah Siswa Tak Sekolah"* dan *"Harus Dicari Sumber Dana Baru"*.

## B. Pemberian Subsidi Pada Daerah Minus Dan Berdasarkan Keadilan Distributif

Berikutnya adalah berkaitan dengan hasil analisis SWOT. Harus diakui bahwa reformasi pendidikan di Indonesia memiliki peluang keberhasilan yang cukup baik, setidaknya hal ini dikarenakan adanya semangat bersama untuk mendesentralisasikan urusan pendidikan menjadi wewenang daerah (Lihat deskripsi ***<u>Strenght</u>*** pada halaman 44 di makalah ini). Tetapi yang harus diwaspadai adalah masih banyaknya daerah kabupaten/kota yang pemerintah daerahnya masih minim anggaran. Pendapatan Asli Daerah nya masih belum mencukupi untuk bisa meng-cover biaya pendidikan di daerahnya jika tidak disubsidi secara khusus dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat (Lihat deskripsi ***<u>Weakness</u>*** pada halaman 45 makalah ini). Sementara itu pada kasus-kasus subsidi, kita semua sudah mengetahui betapa anggaran subsidi itu cenderung bermasalah. Kalau tidak bermasalah karena besarnya, maka

bermasalah karena peruntukannya, karena ketidak adilannya, karena korupnya birokrasi dan lain-lain. Termasuk lemahnya pendataan tentang siapa yang berhak mendapatg subsidi.

Mekanisme subsidi dengan konsep BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebenarnya sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan semangat untuk mendidik. Betapa tidak, BOS diberikan kepada semua murid di semua sekolah SD tanpa kecuali. Murid SD yang orang tuanya kaya raya dan sekolah di SD favorit yang super mahal pun harus mendapat jatah BOS yang sama dengan murid SD yang orang tuanya sangat miskin dan sekolah di SD pinggiran yang sama sekali tidak diperhitungkan. Karena itu penulis mengusulkan agar kebijakan desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada pelayanan dengan semangat menciptakan keadilan distributif, bukan keadilan komulatif.

## C. Perlu Reformasi Birokrasi Pemda

Perlu ada peraturan perundangan baru yang mengatur tentang pendidikan anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin yang berada di wilayah pemerintah daerah yang tidak memiliki kemampuan anggaran berlebih. Sedemikian rupa juga diperlukan perbaikan (reformasi) birokrasi pemerintah (daerah) yang khusus menangani sector pendidikan. Targetnya adalah menciptakan hubungan yang harmonis dan solutif antara Birokrasi-Sekolah-Masyarakat. Memang sekarang hubungan itu sudah dirintis, tetapi cenderung tidak solutif, karena hubungannya bersifat formalistic. Dewan pendidikan dan komite sekolah tidak memiliki akses yang besar untuk memecahkan permasalahan-permaslahan besar di wilayah masing-masing. Bahkan terhadap permasalahan tingginya angka Drop-Out SD dan SMP, lembaga tersebut tidak cukup bergigi, apalagi berwibawa.

## D. Pemda Perlu Menyusun Master-Plan

**Pendidikan dan Dipresentasikan ke Publik**

Akhirnya, perlu juga dipikirkan untuk membuat peraturan yang mengharuskan semua pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan dan otonom, menyusun masterplan pendidikan di wilayahnya masing-masing dan dipresentasikan di tingkat propinsi masing-masing, supaya pemerintah propinsi secara dini sudah bisa mengetahui ke mana arah kebijakan pendidikan pemda di wilayahnya dan kapan serta bagaimana keterlibatan pemprov pada perencanaan dan kebijakan pendidikan di daerah tersebut. Juga hal ini bermanfaat bagi pemerintah daerah yang bersangkutan, karena dengan saling mengetahui presentasi diantara mereka diharapkan mereka saling menyempurnakan master-plannya. Selanjutnya pemerintah propinsi menyusun rencana dan mengidentifikasi factor-faktor lingkungan yang seharusnya dapat diintervensi agar kondusif dengan kebijakan yang direncanakan.

Surabaya, Oktober 2005
Ulul Albab, Drs., MS

# Daftar Bacaan

Alex Inkeles dan Larry J. Diamond, "Personal Development and National Development: A Cross-National Perspective," dalam *The Quality of Life: Comparative Studies*, ed. Alexander Szalai dan Frank M. Andrews, (London: Sage Publications, 1980).

Chan, Sam M dan Sam, Tuti T, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Heidenheimer, at.al, *Comparative Public Policy : The Politics of Social Choice in America, Europe, and Japan*, ST. Martin's Press, New York, 1990.

Huntington, Samuel P., *The Third Wave: Democratization In The Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press, 1991, (Diindonesiakan dalam *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Pustaka Utama Grafiti, 1997.

http://www.depdiknas.go.id, *Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional Indonesia*, Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2004.

http://www.depdiknas.go.id, *Struktur Organisasi Departemen Pendidikan Nasional Indonesia*, Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2004.

http://www.depdiknas.go.id, *Dewan Pendidkkan dan Komite Sekolah Departemen Pendidikan Nasional Indonesia*, Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2004.

http://www.depdiknas.go.id, *Suatu Opini Mengenai Reformasi Sistem Pendidikan Nasional*, (Prof.Dr.H. Muhammad Yacub, Med), Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2004.

http://www.depdiknas.go.id, *Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Pembangunan Pendidikan*, Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2004.

http://www.kompas.com, *Siap-Siap Menyambut Kehadiran Perguruan Tinggi Asing*, Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2004.

http://www.kompas.com, *Pendidikan Luar Negeri: Mengintip Dunia Pendidikan Tinggi di AS*, Copyright @ Harian Kompas, 29 April 2004.

http://www.kompas.com, *Mega Tragedi Pendidikan Nasional*, Copyright @ Harian Kompas, 16 Juni 2004.

http://www.kompas.com, *Mungkinkah Membongkar Korupsi di Daerah?*, Copyright @ Harian Kompas, 16 Pebruari 2005.

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak, Pendelegasian Makin Rumit, Pikiran Rakyat, 19 Februari 2004.

Jawa Pos, *Tingkat Partisipasi Pendidikan SD dan SMP di Surabaya: Tinggi, Jumlah Siswa Tak Sekolah*, 11 Oktober 2005.

Klingemann, Hans-Dieter, at.al, *Parties, Policies, and Democracy*, Diterjemahkan oleh: Sigit Jatmiko, *Partai, Kebijakan dan Demokrasi*, Jentera bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.

Nur, Agustiar Syah, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, Penerbit LUBUK AGUNG, Bandung, 2001.

Peters, B. Guy, *Public Policy Instruments: Evaluating the Tools of Public Administration*, Edward Elgar, USA, 1998.

Ronald Inglehart, "*The Renaissance of Political Culture*," *American Political Science Review 82* (Desember 1988).

Tilaar, H.A.R, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah*, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, 2004.